



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI
SUMATERA SELATAN



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI
SUMATERA SELATAN



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No. ISBN: 978-602-6925-19-0
No. Publikasi: 16550.1808
No. Katalog: 9102067.31

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 28 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Desain Cover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Tata Letak: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://sumsel.bps.go.id>

Kata Pengantar



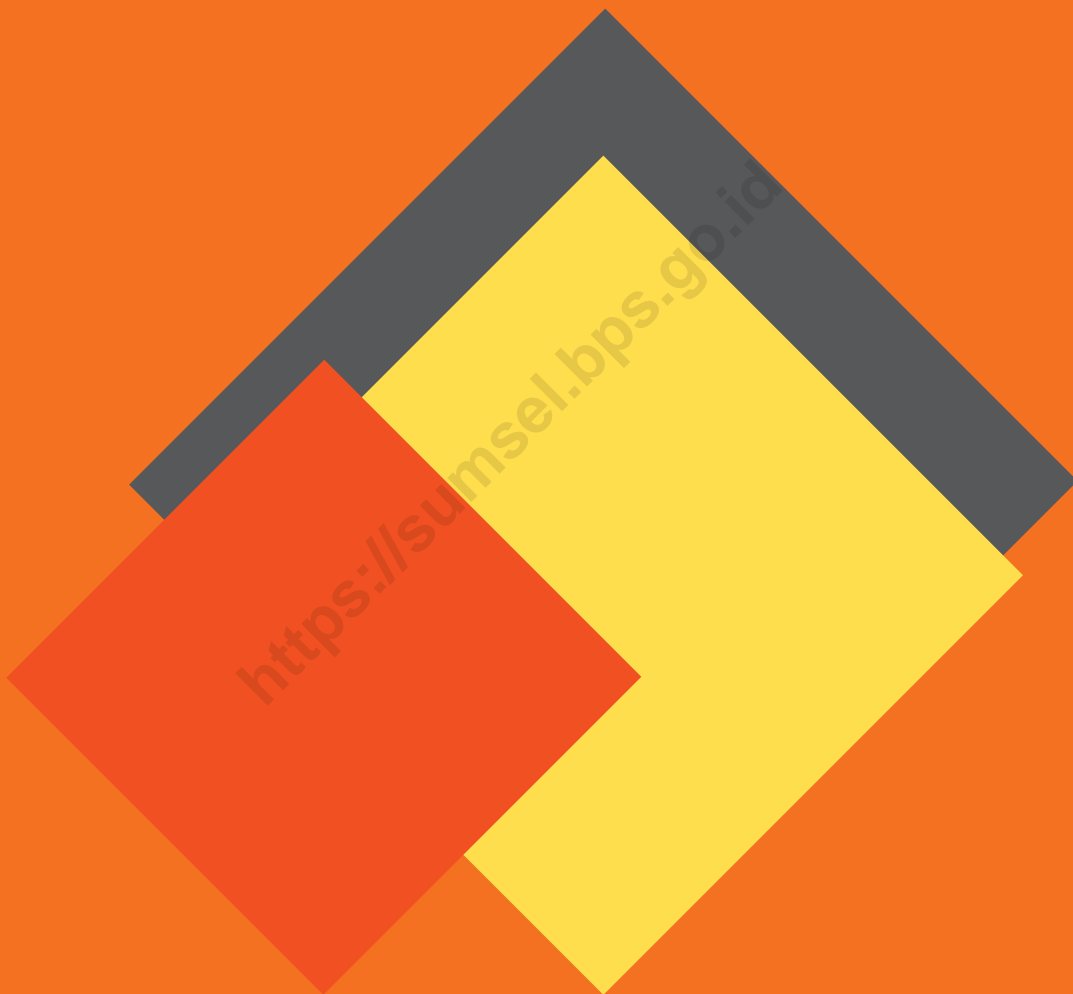
Pada tahun 2016, BPS Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah daerah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

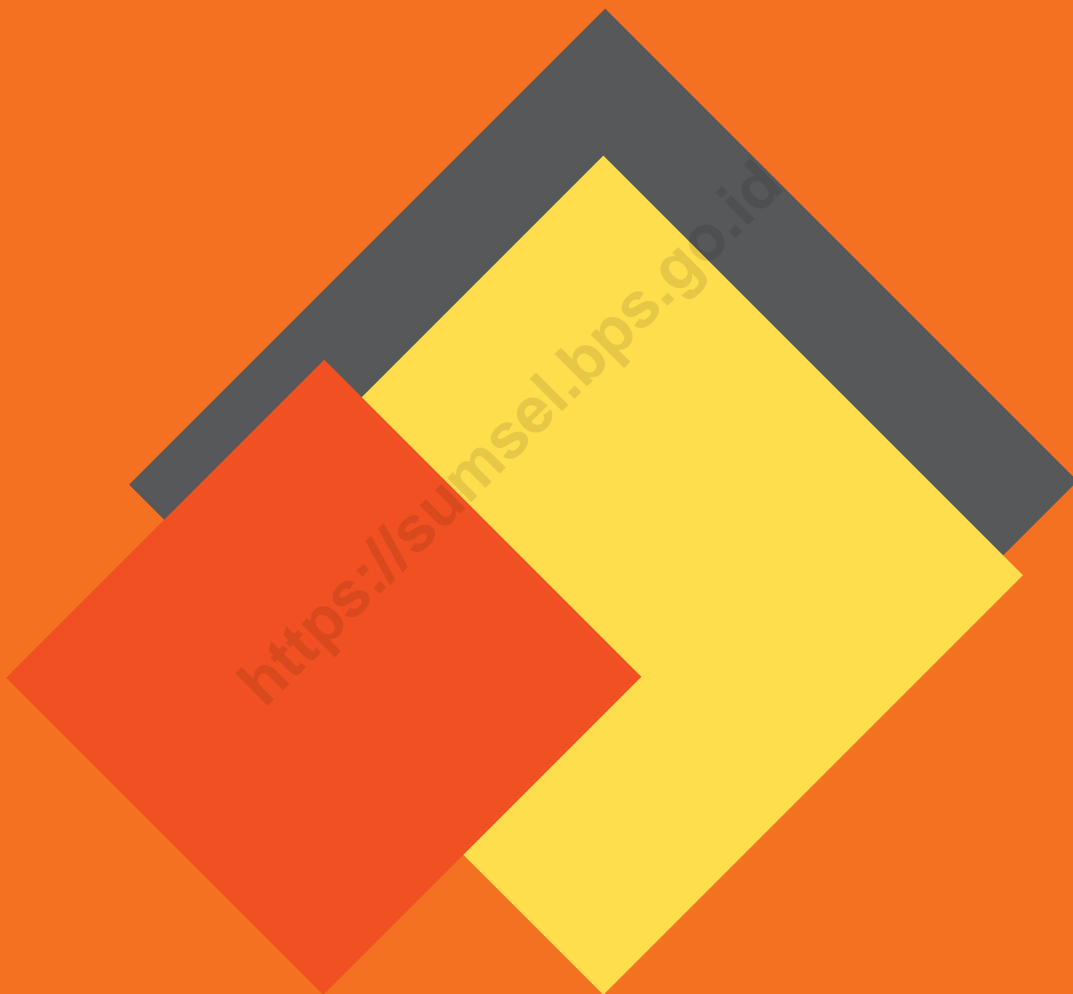
Palembang, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan

Endang Tri Wahyuningsih



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN	17
AKSEBILITAS PERMODALAN UMK	21
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	25
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG	31



Pendahuluan

Dunia usaha Sumatera Selatan pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha mikro kecil mendominasi yaitu sebanyak 648 ribu usaha atau 98,7 persen dari total usaha nonpertanian di Sumatera Selatan. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Sumatera Selatan sebanyak lebih dari 1,7 juta orang atau sekitar 86 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Sumatera Selatan, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
SUMATERA SELATAN

Bagian

1

<https://sumsel.bps.go.id>

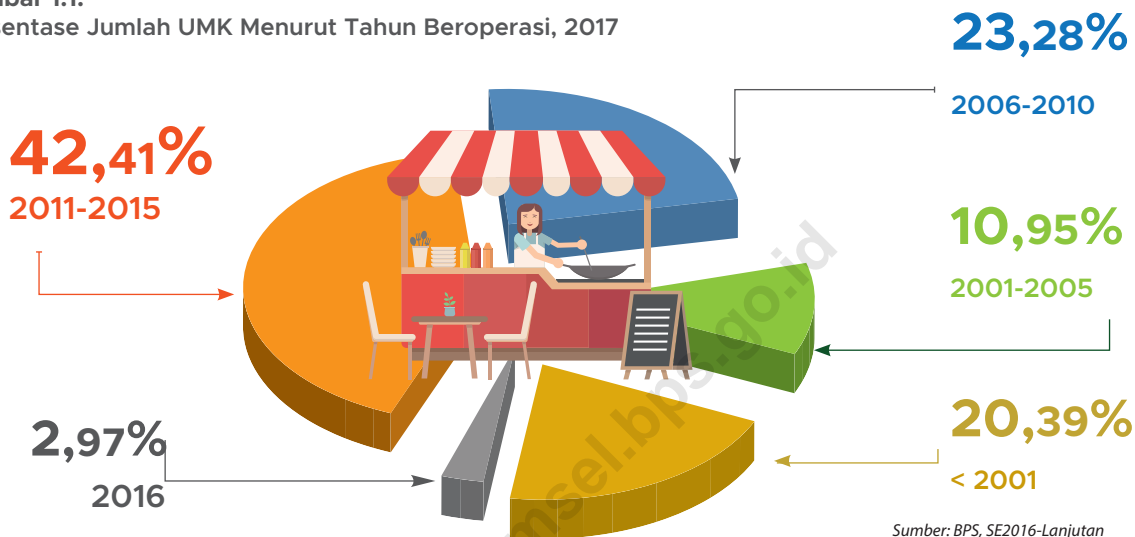
UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 98,99 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar lebih dari 333 ribu usaha atau mencapai lebih dari 50 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing memiliki kontribusi lebih dari 10 persen.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Palembang menjadi pusat pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan. Dari 17 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kota Palembang mencapai 23,30 persen. Pada posisi kedua dan ketiga, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin merupakan dua wilayah dengan jumlah UMK yang cukup besar yaitu masing masing sebesar 9,8 persen dan 8,2 persen dari total seluruh UMK di Provinsi Sumatera Selatan.

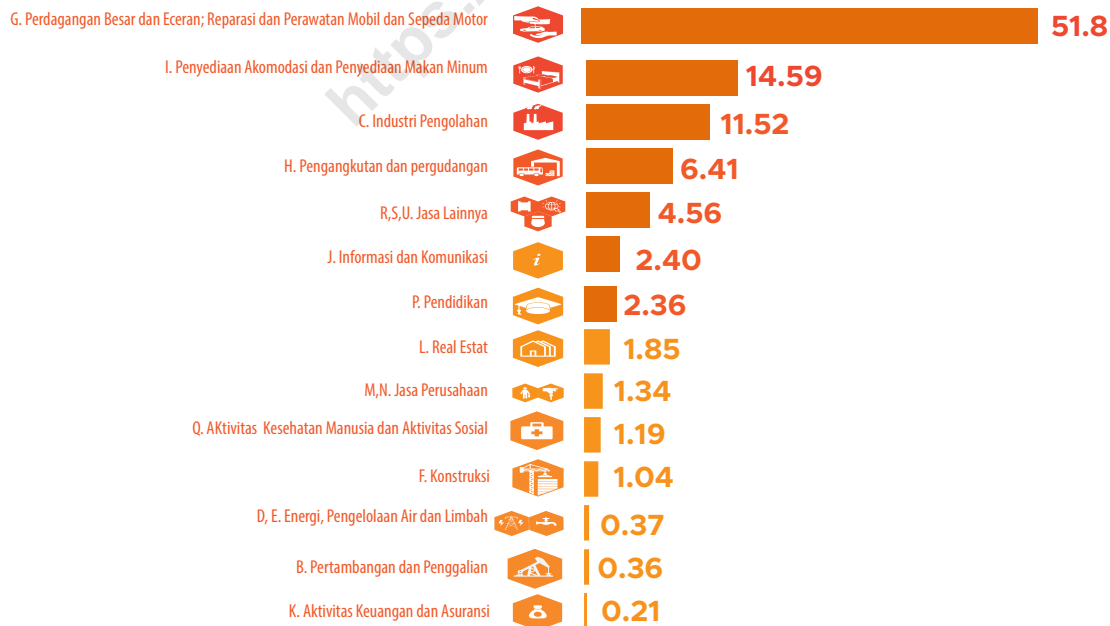
**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
SUMATERA
SELATAN**

Gambar 1.1.
Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Ogan Komering Ulu	25.496	3,96
Ogan Komering Ilir	63.621	9,88
Muara Enim	42.320	6,57
Lahat	34.532	5,36
Musi Rawas	24.483	3,80
Musi Banyuasin	37.080	5,76
Banyu Asin	52.862	8,21
Ogan Komering Ulu Selatan	25.622	3,98
Ogan Komering Ulu Timur	47.028	7,30
Ogan Ilir	46.646	7,24
Empat Lawang	18.845	2,93
Penukal Abab Lematang Ilir	12.163	1,89
Musi Rawas Utara	10.172	1,58
Palembang	150.087	23,30
Prabumulih	16.390	2,54
Pagar Alam	13.632	2,12
Lubuklinggau	23.133	3,59
Sumatera Selatan	644.112	100,00



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://sumsel.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Sumatera Selatan tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas dalam Publikasi Keadaan Pasar Tenaga Kerja 2017, pengangguran di Sumatera Selatan mencapai 4,39 persen, terbanyak pada lulusan pendidikan menengah yang mencapai lebih dari 10,20 persen. Pada umumnya, tingginya kontribusi lulusan menengah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji.

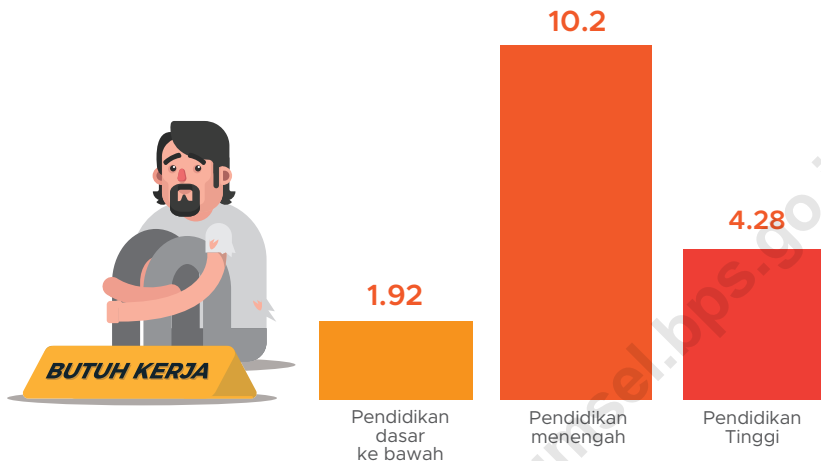
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 1,43 juta, atau lebih dari 80 persen tenaga kerja nonpertanian di Sumatera Selatan.

Penyerapan tenaga kerja untuk UMK di Sumatera Selatan terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 600 ribu jiwa atau mencapai lebih dari 40 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) dan Usaha Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara rata-rata per usaha, UMK kategori Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja per usaha/perusahaan. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Selatan hanya sebesar 2 pekerja per usaha/perusahaan.

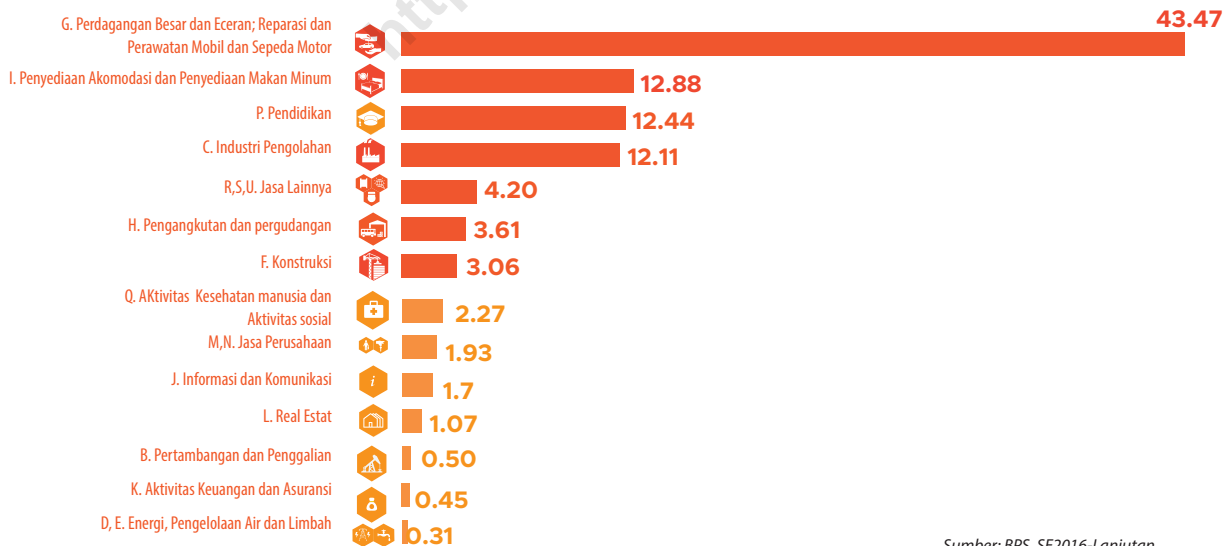
**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Agustus 2017

Gambar 2.2.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian
Menurut Kategori, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	2.342	7.116	3
C. Industri Pengolahan	74.201	173.911	2
D&E. Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	2.383	4.523	2
F. Konstruksi	6.693	43.980	7
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	333.647	624.401	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	41.275	51.865	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	93.959	184.992	2
J. Informasi dan Komunikasi	15.445	24.481	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.352	6.533	5
L. Real Estat	11.891	15.366	1
M, N. Jasa Perusahaan	8.645	27.753	3
P. Pendidikan	15.211	178.669	12
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	7.652	32.647	4
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	29.416	60.262	2
Total	644.112	1.436.499	2

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://sumsel.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja yang besar UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

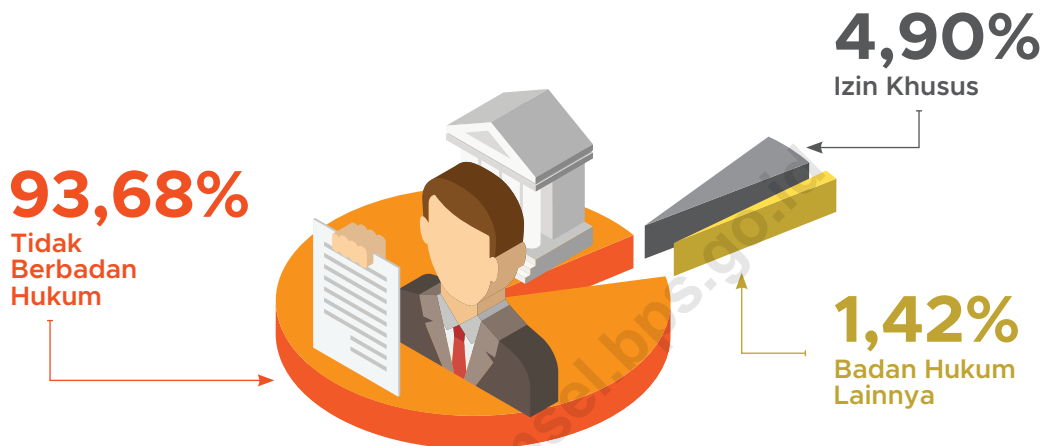
Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Sumatera Selatan, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 93,68 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga

bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

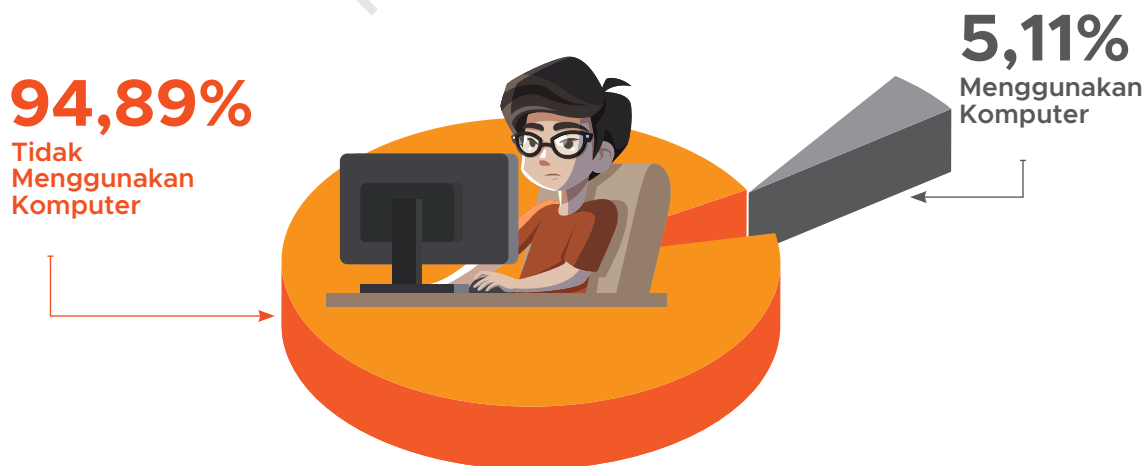
Di antara sektor nonpertanian di Sumatera Selatan, UMK pada Kategori P (Pendidikan) dan Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan hukum, penggunaan komputer, pemanfaatan internet dan kemitraan.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016



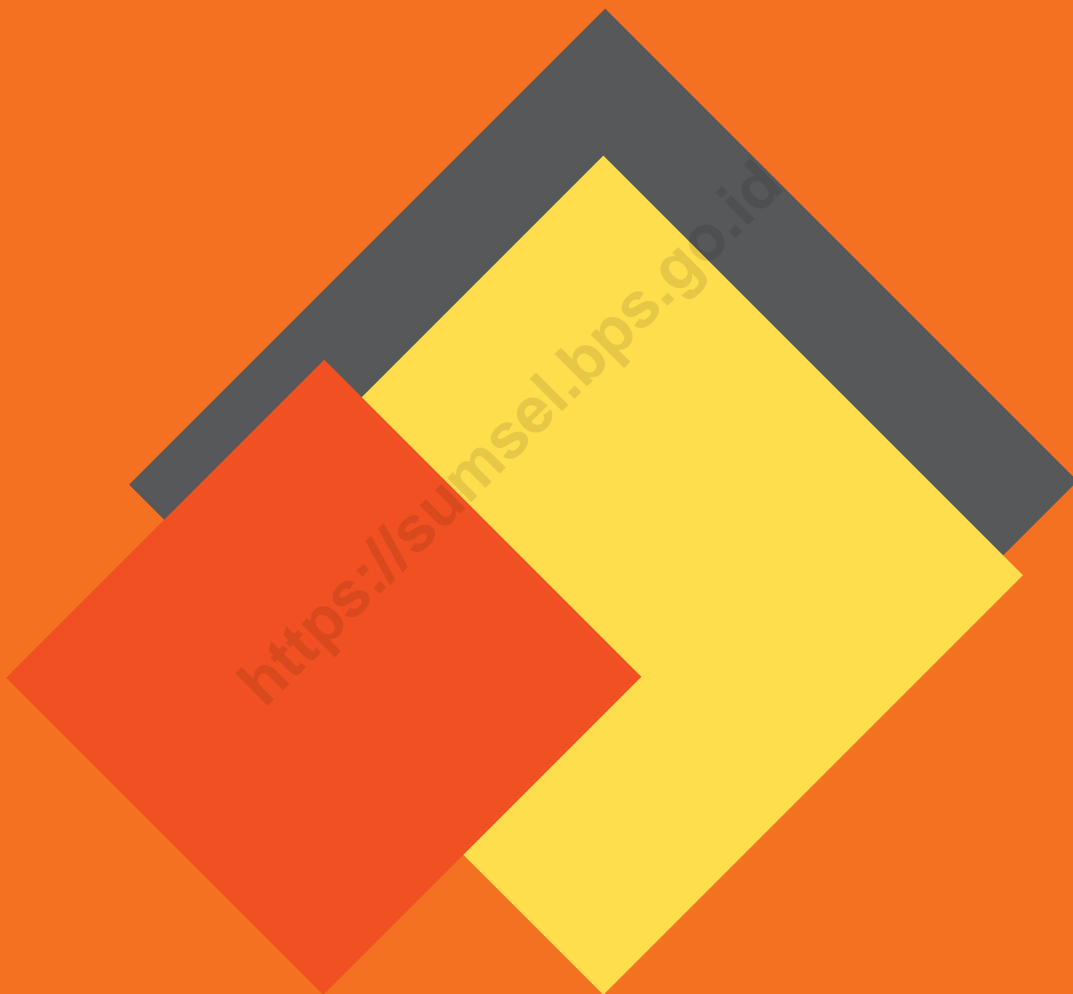
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 3.
Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer,
Menggunakan Internet dan Menjalinkan Kemitraan, 2016

Kategori	Berbadan Hukum	Mempunyai Laporan Keuangan	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
B. Pertambangan dan Penggalian	3,20	0,04	2,95	6,15
C. Industri Pengolahan	6,42	2,99	4,98	16,18
D&E. Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	2,69	18,80	19,56	8,98
F. Konstruksi	6,02	8,16	10,94	10,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,21	2,32	4,70	5,75
H. Pengangkutan dan Pergudangan	3,42	1,58	2,96	4,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2,53	1,05	2,14	2,59
J. Informasi dan Komunikasi	4,67	23,80	31,95	7,63
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	59,17	49,41	30,10	16,94
L. Real Estat	1,63	1,27	1,64	0,19
M,N. Jasa Perusahaan	12,28	31,63	27,62	9,32
P. Pendidikan	60,59	62,40	55,32	12,21
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	57,44	23,89	27,68	15,59
R,S Aktivitas Jasa Lainnya	3,90	6,14	9,65	3,35
Total	6,32	5,11	7,01	6,65

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

<http://sumberdaya.bps.go.id>

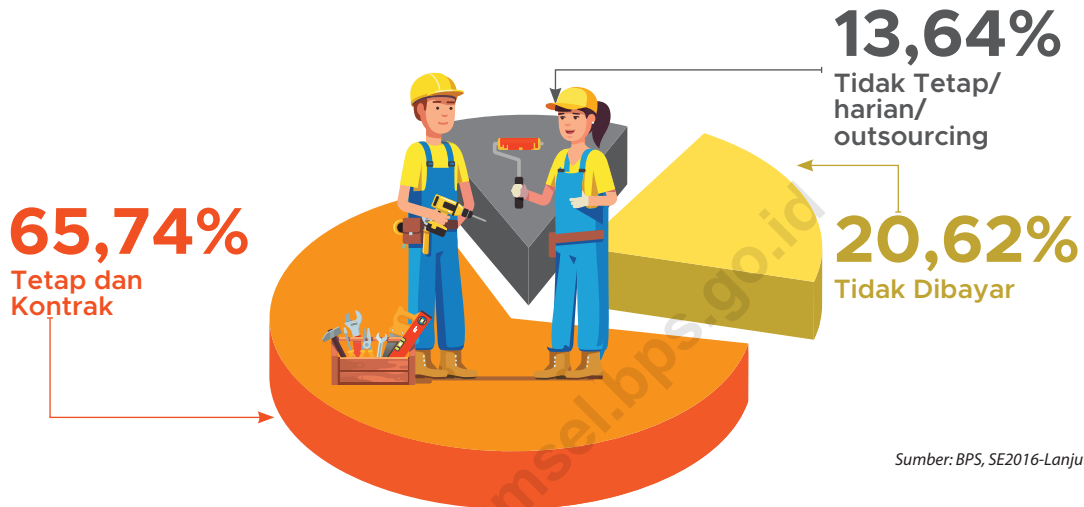
Salah satu faktor untuk keberhasilan usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 20 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dan aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I).

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 39,8 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Lebih dari sepertiga pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Sementara pengelola dengan pendidikan perguruan tinggi baru mencapai kurang dari 10 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pelaku UMK di Sumatera Selatan yang pernah mengikuti pelatihan hanya 3,44 persen.

**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Pekerja, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://sumsel.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

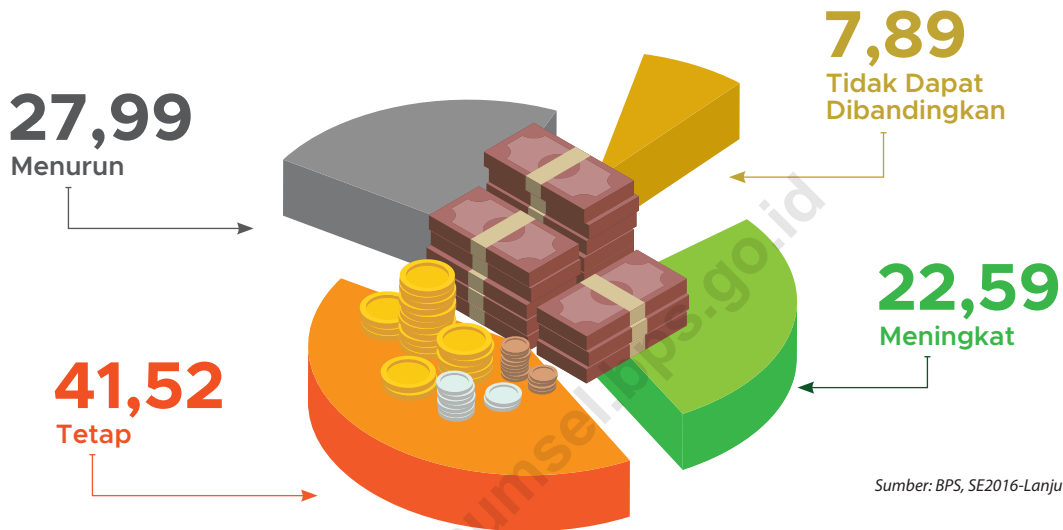
Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari seperempat pengusaha UMK di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor UMK Sumatera Selatan secara keseluruhan mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 122 triliun.

Selain laba usaha, rasio cost to income juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. UMK pada kategori L (Real Estat) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,24. Ini artinya UMK pada kategori L (real estat) mampu mendulang pendapatan hingga empat tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap

pendapatan tertinggi ada pada kategori ada pada kategori P (Pendidikan) dengan rasio mencapai 0,81.

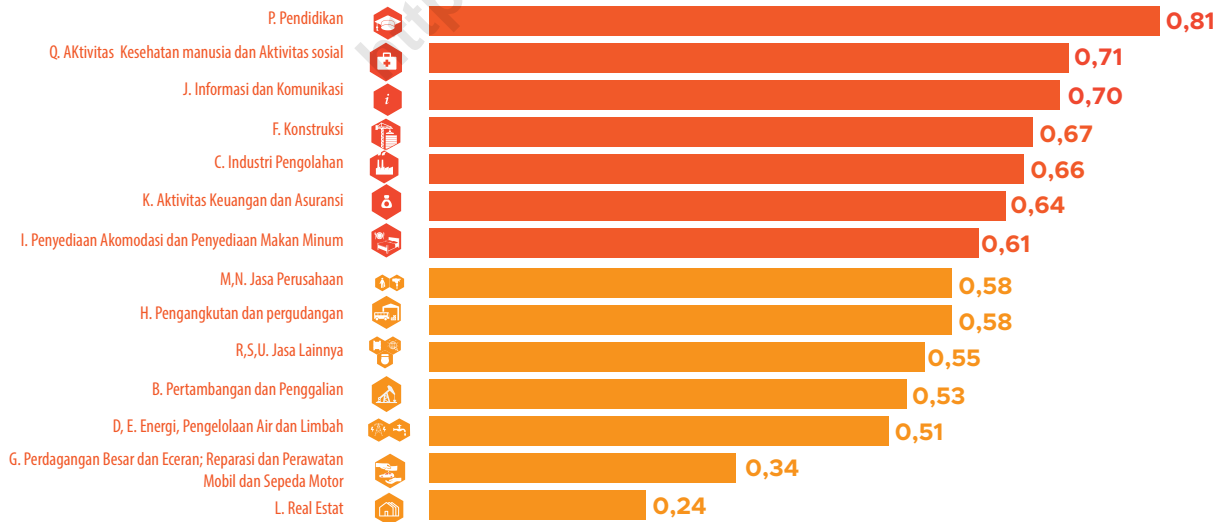
Namun demikian, Kategori L (Real Estat) yang memiliki rasio usaha paling baik bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Di Sumatera Selatan, aktivitas Konstruksi memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 24 juta per pekerja pada tahun 2017. Selanjutnya, Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) sebesar 22 juta per pekerja dan Kategori P (Pendidikan) yang memberikan balas jasa hampir 20 juta per pekerja pada tahun yang sama.

Gambar 5.1.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 5.
Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori (Ribu Rupiah), 2017

Kategori	Balas Jasa
B. Pertambangan dan Penggalian	17.272
C. Industri Pengolahan	11.761
D,E. Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	16.820
F. Konstruksi	24.306
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.132
H. Pengangkutan dan Pergudangan	17.024
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	12.942
J. Informasi dan Komunikasi	8.241
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	16.703
L. Real Estat	12.078
M,N. JasaPerusahaan	10.717
P. Pendidikan	19.329
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	22.196
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	12.172
Total	15.433

**PROSPEK
DAN
KENDALA
USAHA**

<https://sumsel.bps.go.id>

Bagian

6

RPJMN 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 42 persen.

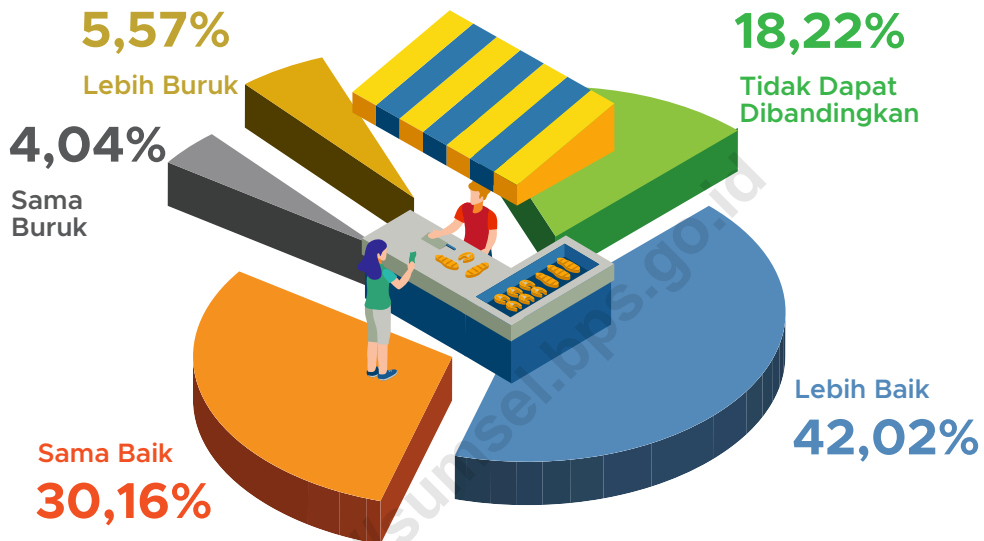
Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Sumatera Selatan 80 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Umumnya kendala yang paling banyak dihadapi oleh UMK adalah kendala permodalan. Sekitar 54,03 persen UMK di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan permodalan sebagai kendala dalam menjalankan bisnis.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses

kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 8 persen usaha di Sumatera Selatan yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan.

Alasan paling banyak yang dikemukakan mengapa hanya sedikit UMK yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan adalah karena suku bunga yang tinggi. Untuk itu kebijakan penetapan suku bunga yang meringankan para pengusaha khususnya pengusaha UMK diharapkan dapat mengatasi kendala permodalan yang dialami UMK. Selain itu masih ada sekitar 14 persen dari pengusaha UMK yang tidak pernah menerima kredit disebabkan karena tidak tahu akan prosedur pengajuan kredit. Untuk itu perlu edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan dan prosedur pengajuan kredit dari pihak terkait.

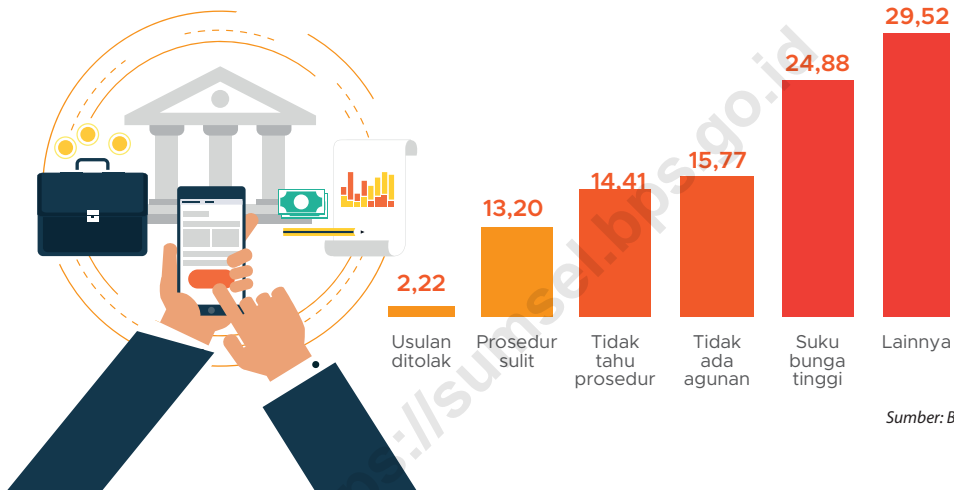
Gambar 6.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Gambar 6.2.
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2016



Gambar 6.3.
Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro No.1131, Palembang

Telp : (0711) 351665, Fax : (0711) 353174

Homepage : <http://www.sumsel.bps.go.id> E-mail : bps1600@bps.go.id

ISBN 978-602-6925-19-0

